

FUNGSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BEA DAN CUKAI
DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN PITA CUKAI
HASIL TEMBAKAU

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum UPN “VETERAN” Jawa Timur



Oleh:

FITRAH AL-AKBAR ISWAN

0871010085

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA

2012

PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI
FUNGSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BEA DAN CUKAI
DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN PITA
CUKAI HASIL TEMBAKAU

Disusun Oleh:

FITRAH AL-AKBAR ISWAN
NPM. 0871010085

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Hariyo Sulistiyantoro, SH., M.M
NIP. 19620625 199103 1 001

Fauzul Aliwarman, SH., M.Hum
NPT. 3 8202 07 0221

Mengetahui,
DEKAN
Fakultas Hukum

Hariyo Sulistiyantoro, SH, MM
NIP. 19620625 199103 1 001

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

FUNGSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BEA DAN CUKAI
DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN PITA
CUKAI HASIL TEMBAKAU

Oleh:

FITRAH AL-AKBAR ISWAN
NPM. 0871010085

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur

Pada tanggal 13 Agustus 2012

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Tim Penguji

1.

Hariyo Sulistiyantoro,SH.,MM
NIP. 19620625 199103 1 001

Hariyo Sulistiyantoro,SH.,MM
NIP. 19620625 199103 1 001

Pembimbing Pendamping

2.

Fauzul Aliwarman, SH.,M.Hum
NPT. 3 8202 07 0221

Yana Indawati,SH.,M.kn
NPT. 3 7901 07 0224

3.

Subani.SH.,M.Si
NIP. 19510504 198303 1 001

Mengetahui,

DEKAN
Fakultas Hukum

Hariyo Sulistiyantoro,SH.,MM
NIP. 19620625 199103 1 001

iii

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

FUNGSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BEA DAN CUKAI
DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN PITA
CUKAI HASIL TEMBAKAU

Oleh:

FITRAH AL-AKBAR ISWAN

NPM. 0871010085

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur
Pada Tanggal 30 Juli 2012

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Tim Penguji

1.

Hariyo Sulistiyantoro,SH.,MM

NIP. 19620625 199103 1 001

Hariyo Sulistiyantoro,SH.,MM

NIP. 19620625 199103 1 001

Pembimbing Pendamping

2.

Fauzul Aliwarman, SH.,M.Hum

NPT. 3 8202 07 0221

Yana Indawati,SH.,M.kn

NPT. 3 7901 07 0224

3.

Subani.SH.,M.Si

NIP. 19510504 198303 1 001

Mengetahui,

DEKAN
Fakultas Hukum

Hariyo Sulistiyantoro,SH.,MM

NIP 19620625 199103 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitrah Al-Akbar Iswan

Tempat/Tanggal Lahir : Indrapura, 24 April 1990

NPM : 0871010085

Konsentrasi : Pidana

Alamat : Jl. Pabrik Kulit Gang. Tamat Utomo No. 112E
Wonocolo Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul: “FUNGSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BEA DAN CUKAI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,
Pembimbing Utama

Surabaya, 25 Juli 2012
Penulis

Hariyo Sulistiyantoro, S.H., MM
NIP. 19620625 199103 1 001

Fitrah Al-Akbar Iswan
NPM. 0871010085

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT serta Shalawat dan Salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayahNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Disini peneliti mengambil judul: "FUNGSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BEA DAN CUKAI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU".

Penyusunan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. Di samping itu dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu hukum dalam mengadakan penelitian guna penyusunan skripsi.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan dorongan oleh beberapa pihak. Maka dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Haryo Sulistiyantoro, S.H., M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dan selaku Dosen Pembimbing utama.
2. Bapak Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Wadek I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
3. Bapak Drs.Ec. Gendut Sukarno, M.S selaku Wadek II Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

4. Bapak Fauzul Aliwarman, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Pendamping, yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pembuatan skripsi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Subani, S.H., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Kedua orang tua tercinta Iswan dan Hj.Armalina , mbakku Maisyarah Iswan, dan adik-adikku Thomy Al-Akbar Iswan dan Karina Iswan serta seluruh keluarga besarku yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil dan doa restunya selama ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Orang-orang terdekatku : Dedy Pratama, Syaiful Rochman, Jaka Adipura, Pancar Triwibowo, Alvin, Danu, Windu, Raditya, Binar Sunu, Apiep, Eky, Rizky A.R, Andina, Brilian, Fatchur Rochman, dan teman-teman My Home Friends “Marga Coy”.
9. Teman-teman dan seluruh Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
10. Instansi KANWIL Direktorat Jendral Bea dan Cukai Tanjung Perak Surabaya Jawa Timur I Khususnya Dibidang P2 (Penindakan dan Penyidikan) yang telah membantu kelancaran penelitian skripsi penulis.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, merupakan kebahagiaan tersendiri bagi penulis apabila ada saran dan kritik yang sifatnya membangun peneliti harapkan guna

memperbaiki dan menyempurnakan penyusunan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Akhir kata, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan berharap penelitian ini memberikan manfaat dan kontribusi untuk pembaca dan dunia pendidikan.

Surabaya, Juli 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI	
SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAKSI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Kajian Pustaka	9
1.5.1 Pengertian Tindak Pidana.....	9
1.5.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	10
1.5.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana	13
1.5.4 Tindak Pidana Pemalsuan	14
1.5.4.1 Pengertian Pemalsuan	14
1.5.4.2 Tindak Pidana Pemalsuan.....	15
1.5.4.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Pemalsuan	16
1.5.5. Cukai	16
1.5.5.1 Pengertian Cukai	16
1.5.5.2 Pita Cukai	18
1.5.5.3 Jenis-jenis Pelanggaran Pemalsuan Pita Cukai Hasil	
Tembakau	19

1.5.5.4 Pencegahan Pemalsuan Pita Cukai Hasil Tembakau .	19
1.5.5.5 Fungsi Penyidikan.....	20
1.5.6. Penyidikan	23
1.5.6.1 Pengertian Penyidikan	23
1.5.6.2 Pengertian Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).....	24
1.5.6.3 Aparat Penyidik	25
1.5.6.4 Pegawai Bea dan Cukai	25
1.6. Metode Penelitian	27
1.6.1 Pendekatan Masalah	27
1.6.2 Sumber Data.....	27
1.6.3 Pengumpulan Data.....	29
1.6.4 Teknik Analisis Data	30
1.6.5 Sistematika Penulisan	32
BAB II FUNGSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)	
BEA DAN CUKAI DALAM PROSES PENYIDIKAN	
TINDAK PIDANA PEMALSUAN PITA CUKAI HASIL	
TEMBAKAU	34
2.1 Identitas Responden	34
2.2 Hasil Penelitian Direktorat Jendral Bea dan Cukai.....	41
2.3 Ketentuan Penyidikan Menurut Undang-undang No.39 Tahun 2007 Tentang Cukai	42
2.4 Analisa Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai Hasil Tembakau.....	43
BAB III PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK	
PIDANA PEMALSUAN PITA CUKAI HASIL	
TEMBAKAU	44
3.1 Sejarah Singkat Kantor Wilayah Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya.....	44

3.2 Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana	
Pemalsuan Pita Cukai Hasil Tembakau	48
3.2.1 Pemberatan dan Peringatan Hukuman Terhadap	
Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai	
Hasil Tembakau.....	49
3.2.2 Motif dari Pemalsuan Pita Cukai Hasil Tembakau	50
3.2.3 Pembuktian Untuk Memastikan Palsu atau	
Tidaknya Pita Cukai Hasil Tembakau	50
3.2.4 Hukuman yang Diberikan oleh Majelis Hakim	
Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai	
Hasil Tembakau.....	50
3.2.5 Skema Proses Penyidikan Tindak Pidana di	
Direktorat Jendral Bea dan Cukai.....	52
3.3 Analisa Mengenai Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku	
Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai Hasil Tembakau	70
BAB IV PENUTUP	73
4.1. Kesimpulan.....	73
4.2. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2 : Kuisisioner
- Lampiran 3 : Rekapitulasi Hasil Kuisisioner
- Lampiran 4 : Hasil Wawancara dengan Pelaksana Selaku Penyidik Pada
KANWIL Bea Cukai Jatim I
- Lampiran 5 : Hasil Wawancara dengan penyidik bidang penindakan dan
penyidikan
- Lampiran 6 : Surat Hasil Penelitian di Kantor Wilayah Direktorat Jendral
Bea dan Cukai Jawa Timur I
- Lampiran 7 : Surat Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri
Surabaya
- Lampiran 8 : Jurnal Yustika Media Hukum dan Keadilan
- Lampiran 9 : Contoh Gambar Pita Cukai Hasil Tembakau Palsu

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWATIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Fitrah Al-Akbar Iswan
NPM : 0871010085
Tempat/Tanggal Lahir : Indrapura, 24 April 1990
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

FUNGSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BEA DAN CUKAI
DALAM PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN PITA
CUKAI HASIL TEMBAKAU

ABSTRAKSI

Maraknya kasus pemalsuan pita cukai hasil tembakau telah memberikan kewajiban kepada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Bea dan Cukai dalam mengungkap dan menindak para pelaku yang diduga seseorang atau badan hukum yang melanggar ketentuan pidana khususnya pemalsuan pita cukai hasil tembakau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memastikan seberapa jauh fungsi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Bea dan Cukai dalam pengembanannya di bidang penindakan dan penyidikan di lapangan dan ada faktor-faktor utama penyebab tidak terlaksannya suatu proses penyidikan tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau maupun indikasi ketidak efektif pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh team penyidik pegawai negeri sipil bea dan cukai. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris yaitu pendekatan masalah dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Sumber data yang diperoleh dari penelitian berbentuk observasi dan wawancara, selain itu digunakan juga literatur-literatur serta perundang-undangan yang berlaku sebagai pendukung dalam penelitian. Analisis data yang digunakan melalui metode deskriptif analis. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, dengan perkembangan upaya nyata sebagai Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai berjalan dengan optimal atas penindakan pelanggaran dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai serta telah meningkatkan citra Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang memberikan rasa keadilan di mata masyarakat umum atas kinerja yang dilakukan sesuai dengan amanah Undang-undang Kepabeanan dan Cukai.

Kata Kunci : Penyidik, Fungsi Penyidik Bea dan Cukai, Pita Cukai

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum sehingga banyak peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menjaga tata tertib dan keseimbangan dalam masyarakat. Hukum dibuat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakatnya, oleh karena itu, segala hal yang dapat mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakatnya berusaha diatur oleh pemerintah. Salah satu produk yang keberadaannya diatur secara tidak langsung oleh pemerintah adalah produk hasil tembakau, salah satunya yaitu rokok. Rokok bukan merupakan hal yang asing lagi saat ini. Rokok dengan merek tertentu, saat ini juga makin dikenal ketika salah satu brand terkenal menjadi sponsor utama suatu ajang sepak bola Indonesia.

Salah satu bentuk kebijakan pemerintah terhadap produk hasil tembakau adalah mengenakan cukai. Cukai di Indonesia secara resmi dimulai oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1889 yaitu diundangkannya ordonansi cukai minyak tanah (stbl 1886 No. 249), ordonansi cukai Alkohol sulingan dalam Negeri di Jawa-Madura (stbl. 1898 No. 90), ordonansi cukai bir (stbl. 1931 Nomor 488 dan 489), ordonansi cukai tembakau (stbl. 1932 No. 517) dan ordonansi Gula (1933 Nomor 351). Dikarenakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, perekonomian nasional, dan masuk menggali potensi yang

terdapat dalam obyek cukai, maka pada tahun 1995 lima ordonansi tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 tanggal 30 desember tentang cukai yang berlaku mulai tanggal 1 april 1996 dan digantikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tanggal 15 Agustus 2007 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1995 tentang cukai.¹

Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai menggantikan beberapa perundang-undangan produk kolonial Belanda, sektor cukai mendapatkan perhatian yang cukup besar dari masyarakat luas, khususnya dari para pakar, pengusaha barang kena cukai dan para pejabat eksekutif maupun legislatif. Hal ini terbukti dengan seringnya lembaga-lembaga kemasyarakatan memandang perlu diadakannya seminar, sarasehan, maupun diskusi-diskusi panel di media elektronika, maupun pemberitaan di media-media cetak. Salah satu faktor penting yang menjadi daya tarik mengapa cukai sering dibicarakan oleh berbagai kalangan masyarakat adalah peranannya terhadap pembangunan dalam bentuk sumbangannya kepada penerimaan negara yang tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada saat ini Indonesia masih termasuk dalam kelompok “extremely narrow” (Terbatas yang sangat luar biasa) dalam pengenaan cukai karena cukai dipungut

¹Digital_124004-SK-Fis 011 2008 Yul K-Kebijakan perubahan-Pendahuluan.pdf (SECURED) – Adobe Reader. Diakses pada tanggal 18 April 2012 00.12

hanya terhadap tiga jenis barang yaitu Etil Alkohol (EA), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan Hasil Tembakau (HT).²

Dalam upaya menghimpun cukai untuk menutup penerimaan negara dalam APBN dari sektor cukai, pemerintah tidak dapat secara terus menerus tergantung pada tiga jenis Barang Kena Cukai (BKC) tersebut. Untuk masa yang akan datang sudah harus diupayakan adanya pengembangan BKC (usaha ekstensifikasi) yang lain yang dapat meningkatkan penerimaan negara dari cukai. Dalam rangka ekstensifikasi (usaha perluasan) BKC ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah mencoba untuk memperkenalkan 12 jenis calon BKC untuk mendapatkan tanggapan atau masukan dari berbagai pihak seperti pengusaha, dan para pakar. Berbagai masukan tersebut akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan dalam pengembangan BKC ini.

Di Negara-negara lain pada umumnya telah menetapkan barang kena cukai lebih dari tiga jenis. Sebagai gambaran misalnya, Finlandia mengenakan cukai terhadap 16 jenis barang, Perancis 14 jenis barang, India 28 jenis barang, Jepang 24 jenis, Malaysia sebanyak 14 jenis barang, Jerman 13 jenis dan Singapura mengenakan cukai terhadap 10 jenis barang. Sementara itu, negara-negara OECD (Organization for Economic

²Eddhi Sutarto, Penyidikam Tindak Pidana Kepabean Dan Cukai, <http://kantorhukumindrayana.blogspot.com/2009/08/penyidikan-tp-kepabeanan-dan-cukai.html> diakses pada tanggal 18 April 2012 pukul 03.00

Cooperation and Development) dewasa ini mengenakan cukai terhadap 3 jenis barang, yaitu EA, MMEA dan HT.

Disamping upaya ekstensifikasi sebagai cara untuk meningkatkan penerimaan cukai, pemerintah juga telah menempuh upaya intensifikasi, antara lain melalui penerapan strategi kebijakan tarif dan Harga Jual Eceran (HJE), penegakan hukum (law enforcement), pemantauan HJE, audit dan verifikasi serta peningkatan pemeriksaan fisik BKC. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, cukai mempunyai peranan yang sangat penting dalam APBN khususnya dalam kelompok Penerimaan Dalam Negeri yang senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Apabila dalam Tahun Anggaran (TA) 1990/1991 penerimaan cukai baru mencapai Rp. 1.799,8 miliar atau menyumbang sekitar 4% dari Penerimaan Dalam Negeri maka dalam TA 1999/2000 jumlah tersebut telah meningkat menjadi Rp. 10.398,0 miliar atau menyumbang sebesar 7,3%. Berdasarkan gambaran tersebut diatas, maka pada dasarnya penerimaan cukai masih memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan peranannya sebagai salah satu sumber dana pembangunan.

Perkembangan realisasi cukai hasil tembakau terlihat mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun dan perbandingannya dengan penerimaan cukai lainnya hampir mencapai tingkat rata-rata 94% per tahun. Sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan dana untuk kegiatan pemerintahan disatu pihak, semakin berfluktuasinya penerimaan

negara dari sektor migas, serta semakin sulitnya memperoleh pinjaman luar negeri, maka diperlukan upaya peningkatan dana yang berasal dari dalam negeri termasuk penerimaan cukai. Disamping itu, mengingat masih rendahnya rasio antara penerimaan cukai terhadap PDB di Indonesia yaitu baru sekitar 0,75%, sementara di negara-negara lain telah mencapai rata-rata diatas 2%. Hal ini mengindikasikan bahwa penerimaan cukai masih mungkin untuk terus dikembangkan baik melalui ekstensifikasi maupun melalui intensifikasi.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari cukai tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya baik melalui ekstensifikasi berupa penambahan barang kena cukai maupun melalui intensifikasi melalui upaya penegakan hukum (law enforcement), pemantauan HJE, audit dan verifikasi serta peningkatan pengawasan fisik maupun administrasi barang kena cukai. Dalam ekstensifikasi berupa penambahan barang cukai telah dipilih 12 jenis barang untuk dikenakan cukai yaitu sabun, deterjen, air mineral, semen, sodium cyclamate dan sacharine, gas alam, metanol, ban, minuman ringan, kayu lapis, bahan bakar minyak dan baterai kering/accu.³

Cukai merupakan pajak Negara yang dibebankan kepada pemakai dan bersifat selektif serta perluasan pengenaannya berdasarkan sifat atau

³Hendra Yerison, Murni Daulay, Lian Dalimunthe dan Sya'ad Afifuddin, Analisis Kebijakan Cukai Terhadap Penerimaan Dalam Negeri, Jurnal Yustika, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Volume 8 Nomor 2 Desember 2005

karakteristik objek cukai. Oleh karena itu, selain bertujuan membina dan mengatur, juga memperhatikan prinsip :

- a. Keadilan dalam keseimbangan
- b. Pemberian insentif yang bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional
- c. Pembatasan dalam rangka perlindungan masyarakat di bidang kesehatan, ketertiban dan keamanan
- d. Netral dalam pungutan cukai yang tidak menimbulkan distorsi pada perekonomian nasional
- e. Kelayakan administrasi dengan maksud agar pelaksanaan administrasi cukai dapat dilaksanakan
- f. Kepentingan penerimaan negara, dalam arti fleksibilitas ketentuan dalam undang-undang ini dapat menjamin peningkatan penerimaan Negara
- g. Pengawasan dan penerapan sanksi untuk menjamin ditaatinya ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Bab pertama Pasal 4 Undang-undang No.11 tahun 1995 tentang Cukai pada menyatakan bahwa :

1. Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari :
 - a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya.
 - b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol.

- c. Hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
2. Penambahan atau pengurangan jenis barang kena cukai diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.⁴

Menegakkan sistem hukum dan perundang-undangan merupakan tugas dan kewajiban yang memang sangat berat, tetapi harus dilaksanakan secara profesional oleh para penegak hukum di berbagai instansi-instansi yang ada di Republik Indonesia. Berbagai upaya dilakukan baik melalui pemberdayaan dari pihak masyarakat maupun usaha-usaha merevisi peraturan perundang-undangan dalam pembenahan sistem hukum itu sendiri.

Negara Kesatuan Republik Indonesia seringkali mengalami kerugian-kerugian yang sangat signifikan terhadap kecurangan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab yang telah melakukan tindak pidana pemalsuan-pemalsuan yang berkaitan dengan pita cukai palsu, maka saya terdorong untuk mengkaji secara spesifik penegakkan hukum khususnya dibidang cukai untuk membahas “Fungsi Pejabat Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai Hasil Tembakau” agar demi terciptanya suatu keadilan dan kesejahteraan bangsa dan Negara demi menyelamatkan keuangan Negara.

⁴ Anastasia Eka Cahyawati, *Himpunan Lengkap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai*, Andi Offset, Cetakan I, Yogyakarta, 2008, h. 59

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dalam proses penyidikan tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau?
- b. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui fungsi pejabat pegawai negeri sipil bea dan cukai dalam proses penyidikan tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau.
- b. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pabean dan cukai serta dapat membedakan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, terkait mengenai fungsi pejabat pegawai negeri sipil bea dan cukai dalam proses penyidikan pemalsuan pita cukai hasil tembakau.

b. Manfaat Praktis

- (1) Untuk menambah pengetahuan mengenai tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau.
- (2) Bagi aparat penegak hukum khususnya Pejabat Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai, Kepolisian, Jaksa, Hakim, agar selalu mengedepankan eksistensinya dan meningkatkan prioritasnya terhadap penegakan hukum yang ada pada aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku bagi seluruh Masyarakat dan Negara Indonesia.

1.5. KAJIAN PUSTAKA

1.5.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dibagi menjadi 2 yaitu pidana umum adalah semua delik pidana yang diatur dalam KUHP, sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang tertentu. Contoh Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundry) berdasarkan UU No 15 tahun 2002 jo. UU No 25 tahun 2003 jo. UU No 8 tahun 2010 dan Tindak Pidana Cukai berdasarkan UU No. 11 tahun 1995.⁵

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Strafbaar feit berasal dari tiga kata, yakni straf,baar, dan feit. Ternyata straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk

⁵Moeljatno, Istilah Perbuatan Pidana, Raneka Cipta, Cetakan V, Jakarta, 2009, h. 61

kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah :

- a. Tindak pidana
- b. Peristiwa pidana
- c. Pelanggaran pidana
- d. Perbuatan yang boleh dihukum
- e. Perbuatan yang dapat dihukum
- f. Perbuatan pidana⁶

1.5.2 Unsur-Unsur Tindak pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni :

- a. Dari sudut teoritis, dan
- b. Dari sudut undang-undang.

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, pada sudut pada undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

1) Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis.

⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Cetakan II, Jakarta, 2009, h.

Di muka telah dibicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum, baik penganut paham dualisme maupun paham monoisme. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya.

Beberapa contoh, diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoritisi.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

- a. perbuatan,
- b. yang dilarang (oleh aturan hukum),
- c. ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut R.Tresna, unsur tindak pidana adalah :

- a. perbuatan/ rangkaian perbuatan (manusia)
- b. yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
- c. diadakan tindakan penghukuman.

Menurut Vos, unsur tindak pidana adalah :

- a. kelakuan manusia,
- b. diancam dengan pidana,
- c. dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut jonkers, unsur tindak pidana adalah :

- a. perbuatan (yang),
- b. melawan hukum (yang berhubungan dengan),
- c. kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat),

d. dipertanggungjawabkan.

Menurut Shcaravendijk, unsur tindak pidana adalah :

- a. kelakuan (orang yang),
- b. bertentangan dengan dengan keisyafan hukum,
- c. diancam dengan hukuman,
- d. dilakukan oleh orang (yang dapat),
- e. dipersalahkan/ disalahkan.

Walaupun rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamannya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

2) Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP

itu dapat diketahui 11 unsur tindak pidana, yaitu :

- a. unsur tingkah laku,
- b. unsur melawan hukum,
- c. unsur kesalahan,
- d. unsur akibat konstitutif,
- e. unsur keadaan yang menyertai,
- f. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana,
- g. unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana,
- h. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana,
- i. unsur objek hukum tindak pidana,
- j. unsur kualitas objek hukum tindak pidana,
- k. unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subyektif, sedangkan selebihnya berupa unsur obyektif.⁷

1.5.3 Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :

- 1) Kejahatan dan Pelanggaran yang diatur dalam KUHP menempatkan kejahatan di dalam buku kedua dan pelanggaran dalam buku ketiga.
- 2) Delik Formal (formil) yaitu delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu dengan kata lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri dan sedangkan Delik Material (materiil) yaitu titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah.
- 3) Delik Dolus yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan dan sedangkan Delik Culpa yaitu memuat unsur kealpaan.
- 4) Delik Commissionis yaitu misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya dan sedangkan Delik Omissionis yaitu dapat kita jumpai pada Pasal 522 (tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi), Pasal 164 (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat).
- 5) Delik Aduan yaitu tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena, dan sedangkan Delik Biasa (bukan aduan) yaitu misalnya tindak pidana didalam proses penangkapan, orang awam dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan jika dalam keadaan tertangkap tangan, yaitu ketika sedang berbuat.
- 6) Jenis Delik yang lain, antara lain
 - a. Delik berturut-turut
 - b. Delik yang berlangsung terus
 - c. Delik yang berkualifikasi
 - d. Delik dengan privilege (peringanan)
 - e. Delik politik

⁷ Ibid, h. 78

- f. Delik propria (tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu.⁸

1.5.4. Tindak Pidana Pemalsuan

1.5.4.1 Pengertian Pemalsuan

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen (lihat dokumen palsu), dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Menyalin, studio penganda, mereproduksi tidak dianggap sebagai pemalsuan, meskipun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan. Dalam hal penempatan uang atau mata uang itu lebih sering disebut pemalsuan. Barang konsumen tetapi juga meniru ketika mereka tidak diproduksi atau yang dihasilkan oleh manufaktur atau produsen diberikan pada label atau merek dagang tersebut ditandai oleh simbol. Ketika objek-adakan adalah catatan atau dokumen ini sering disebut sebagai dokumen palsu.⁹

Pemalsuan adalah perbuatan mengubah atau meniru dengan menggunakan tipu muslihat sehingga menyerupai aslinya.

1. Macam-macam pemalsuan :

- a. Pemalsuan intelektual pemalsuan intelektual tentang isi surat/tulisan.
- b. Pemalsuan uang : pemalsuan mata uang, uang kertas Negara/bank, dan dipergunakan sebagai yang asli.

⁸ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo, Cetakan II, Jakarta, 2011, h. 57

⁹ Taufik Ridho, Analisis Pemalsuan, <http://id.wikipedia.org/wiki/Pemalsuan>, diakses pada hari minggu, tanggal 7 mei 2012, pukul 16.00

- c. Pemalsuan materiel : pemalsuan tentang bentuk surat/ tulisan.
- d. Pemalsuan merek : pemalsuan merek dengan maksud menggunakan/ menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah merek yang asli.
- e. Pemalsuan materai : pemalsuan materai yang dikeluarkan Negara/ peniruan tanda tangan, yang diperlukan untuk keabsahan materai dengan maksud menggunakan/ menyuruh orang lain untuk memakainya seolah-olah materai yang asli.
- f. Pemalsuan tulisan : pemalsuan tulisan termasuk surat, akta, dokumen/ peniruan tanda tangan orang lain, dengan maksud menerbitkan hak, menghapus utang serta menggunakannya/ menyuruh orang lain menggunakan seolah-olah tulisan yang asli.¹⁰

1.5.4.2. Tindak Pidana Pemalsuan

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹¹

Menurut hukum romawi, yang dipandang sebagai *de eigenlijke falsum* atau sebagai tindak pidana pemalsuan yang sebenarnya ialah pemalsuan surat-surat berharga dan pemalsuan mata uang dan baru kemudian telah ditambah dengan sejumlah tindak pidana yang sebenarnya tidak dapat dipandang sebagai pemalsuan,

¹⁰ Andi Hamzah, Terminology Hukum Pidana, Sinar Grafika, Cetakan I, Jakarta, 2008, h. 112

¹¹ Lisa, Pengertian Pemalsuan, <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2010/11/tindak-pidana.html>, Diakses pada tanggal hari minggu, tanggal 6 mei 2012, pukul 23.00

sehingga tindak pidana tersebut didalam doktrin juga disebut quasti falsum atau pemalsuan semu.¹²

1.5.4.3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemalsuan

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahiriah (dunia). Unsur-unsur tersebut antara lain :

- a. Kelakuan dan akibat.
- b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan yang mana mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar si pelaku.
- c. Unsur tambahan, karena keadaan tambahan tersebut dinamakan unsur-unsur yang memberatkan pidana.
- d. Adanya perbuatan-perbuatan tertentu seperti memalsukan pita cukai hasil tembakau, maka perbuatan yang tertentu atas sifat pantang dilakukannya perbuatan itu sudah tampak dengan wajar, sifat melawan perbuatan hukum.
- e. Unsur melawan hukum dalam rumusan delik yang menunjuk kepada keadaan lahir objektif dan subjektif yang menyertai perbuatan.¹³

1.5.5 Cukai

1.5.5.1. Pengertian Cukai

Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan undang-undang.¹⁴

¹² P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan, Sinar Grafika, Cetakan IV, Jakarta, 2009, h. 2

¹³ Moeljatno, loc.cit., h. 64

¹⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-pokok Hukum Cukai dan Materai, Pustaka Sinar Harapan, Cetakan I, Jakarta, 1997, h. 7

Barang-barang yang telah ditetapkan sebagai Barang Kena Cukai (BKC) sebagai berikut :

1. Etil alkohol atau Etanol, dengan dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, etil alkohol atau etanol adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumusan kimia C_2H_5OH , yang diperoleh baik secara peragian atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.
2. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenis.
3. Hasil Tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.¹⁵

Pelunasan cukai terhadap BKC dilaksanakan dengan cara pembayaran, pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.

BKC yang pelunasan cukainya dengan pelekatan pita cukai salah satunya adalah Hasil Tembakau berupa Sigaret, yang terdiri dari :

1. Sigaret Kretek Mesin (SKM);
2. Sigaret Putih Mesin (SPM);
3. Sigaret Kretek Tangan (SKT);
4. Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF);
5. Sigaret Putih Tangan (SPT);
6. Sigaret Kelembak Kemenyan (KLM);
7. Cerutu (CRT);
8. Rokok Daun atau Klobot (KLB);
9. Tembakau Iris (TIS); dan
10. Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL).

Hasil Tembakau hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan

¹⁵ Ibid, h. 12

telah dilekati pita cukai yang diwajibkan. Pita cukai merupakan dokumen sekuriti negara, selain sebagai bukti pelunasan cukai berfungsi sebagai alat pengawasan. Pelunasan cukai dimaksud dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁶

1.5.5.2 Pita Cukai

Pita cukai adalah suatu alat yang digunakan untuk pelunasan cukai yang terutang atas barang kena cukai. Pita cukai berupa kepingan kertas dengan ukuran dan desain tertentu yang ditetapkan. Pita cukai digunakan oleh wajib cukai (pengusaha pabrik yang telah mempunyai NPPBKC) sebagai tanda pelunasan cukai yang terutang. Pita cukai diperoleh oleh wajib cukai di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

Pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak Negara yang melekat pada barang kena cukai, dalam hal ini berupa hasil tembakau (rokok), sehingga hasil tembakau tersebut dapat dikeluarkan dari pabrik. Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya. Hasil tembakau dianggap telah dilunasi cukainya, setelah hasil tembakau tersebut telah dilekati pita cukai sesuai

¹⁶Moestofa, Pita Cukai Hasil Tembakau, <http://www.kendalkab.go.id/index.php/lembaga-lain-daerah/satpol-pp/2148-pita-cukai-hasil-tembakau-bag-1>. diakses pada hari minggu, tanggal 17 April 2012 pukul 23.00

ketentuan yang berlaku. Untuk hasil tembakau yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukai harus dilakukan sebelum hasil tembakau dikeluarkan dari pabrik.¹⁷

1.5.5.3. Jenis-Jenis Pelanggaran Pemalsuan Pita Cukai Hasil

Tembakau

Jenis pelanggaran pita cukai hasil tembakau antara lain :

1. Tembakau yang dilekati oleh pita cukai yang bukan peruntukkan tembakau tersebut.
2. Menggunakan pita cukai bekas dan pita cukai sisa yang tidak terpakai yang telah habis masa berlakunya.
3. Pemalsuan pita cukai.
4. Menjual rokok polos tanpa cukai dan tanpa merek.
5. Produksi rokok tanpa surat ijin.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan karena secara empiris dilapangan terdapat hambatan-hambatan yang sulit untuk diperuntukkan oleh para industri yang memproduksi rokok secara ilegal, kebanyakan rokok ilegal di produksi oleh industri yang ilegal pula, yaitu industri yang tidak memiliki NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) salah satu kendalanya adalah sulitnya prosedur pengurusan NPPBKC dan biaya relatif mahal karena tidak sesuai dengan omset produksi rokok.¹⁸

1.5.5.4. Pencegahan Pemalsuan Pita Cukai Hasil Tembakau

Pencegahan pemalsuan pita cukai hasil tembakau dengan :

1. Melakukan sosialisasi berbagai aturan kecukaaian.
2. Melakukan fasilitasi dalam legalitas pabrik hasil tembakau.
3. Melakukan monitoring ke pedagang eceran untuk mendeteksi konsumen dan wilayah pasar dari pemalsuan pita cukai/ rokok ilegal.
4. Melakukan penyitaan dan pengambilan sampel berbagai pita cukai palsu/ rokok ilegal yang beredar di pasaran.

¹⁷ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. Op.cit., h. 20

¹⁸ Priyo Dharmawan. "Mencegah Praktek Cukai Rokok Ilegal di Jawa Timur Jangan Sekedar Merazia", Buletin Balitbang Provinsi Jawa Timur, Edisi 57, Mei-Juni 2011, h. 9

5. Melakukan kegiatan monitoring dan berkoordinasi dengan kantor Bea dan Cukai dalam penindakan.¹⁹

1.5.5.5. Fungsi Penyidikan

Fungsi dapat dikategorikan dengan fungsionalisme hukum pidana. Hal ini mengandung makna bagaimana untuk membuat hukum pidana itu dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara konkret. Jadi istilah fungsionalisme hukum pidana dapat diidentikkan dengan istilah operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana yang pada hakikatnya sama dengan pengertian penegakkan hukum pidana.²⁰ Bertolak dari pengertian yang demikian, fungsionalisme hukum pidana seperti fungsionalisasi atau proses penegakkan hukum pada umumnya melibatkan minimal tiga faktor yang terkait yaitu,

1. Faktor perundang-undangan, patut dikaji adalah faktor kebijakan legislatif, peninjauan masalah ini sangat penting karena kebijakan legislatif pada dasarnya merupakan tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan perencanaan proses fungsionalisme hukum pidana atau proses penegakkan hukum pidana. Tahap kebijakan legislatif merupakan tahap formulasi yang menjadi dasar, landasan dan tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Tahap formulasi dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif yang merupakan tahap penegakkan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap ini dapat juga merupakan tahap kebijakan yudikatif. Tahap eksekusi merupakan tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administratif.²¹

¹⁹ Ibid. h. 10

²⁰ Trini Handayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia Khususnya Ginjal untuk Kepentingan Transplantasi*, Mandar Maju, Cetakan I, Bandung, 2012, h. 42

²¹ Ibid, h. 52

2. Faktor aparat atau penegak hukum. Faktor-faktor ini sangat ditentukan oleh sikap pemimpin yang konsisten, mempunyai komitmen, dan selalu mempunyai kompetensi dalam penanggulangan tindak pidana. Istilah penegak hukum sangat luas, karena mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Penegak hukum yang dimaksud disini adalah kalangan yang berkecimpung dalam bidang law enforcement dan peace maintenance, yang mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kepolisian, PNS, kepengacaraan dan pemasyarakatan. Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peran (role). Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Peranan yang ideal (ideal role)
 - b. Peranan yang seharusnya (expected role)
 - c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role)
 - d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role)²²
 - e. Faktor kesadaran hukum Masyarakat.
3. Pembentukan produk hukum tidak dapat secara absolut dapat menciptakan suatu perubahan perilaku yang dikehendaki oleh hukum itu sendiri. Dengan kata lain dapat dikatakan, norma-norma hukum yang sifatnya tidak memberikan manfaat bagi masyarakat sehingga akan berdampak pada banyaknya terjadi pelanggaran ditengah-tengah masyarakat. Sebaliknya jika masyarakat memandang bahwa aturan-aturan hukum itu memberikan nilai manfaatnya, masyarakat akan mengakomodasikan aturan tersebut secara sukarela. Hukum bekerja dengan cara mengatur perbuatan seseorang atau mengatur hubungan antara orang-orang dalam masyarakat, oleh karena itu, fungsi hukum disini adalah :
 - a. Pembuatan norma-norma yang mengatur hubungan antara orang dalam masyarakat.
 - b. Menyelesaikan sengketa yang timbul dimasyarakat
 - c. Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat, dalam hal adanya perubahan dalam masyarakat.²³

Pembagian ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu,

²² Ibid, h. 56

²³ Ibid, h. 58

1. Substansi hukum dalam praktik antara *das sollen* dan *das sein* seringkali tidak sejalan, sering terjadi ambiguity (dua arti) dan duplikasi pada substansi hukum berupa produk Undang-undang, rumusan pasalnya sering menimbulkan multitafsir. Konsekuensi logis dari perbedaan penafsiran ini, akan memunculkan kegamangan atau keragu-raguan dalam penerapannya, sehingga berimplikasi terhadap kepastian hukum.
2. Struktur hukum menyangkut Sumber Daya Manusia (SDM) atau *brainware*, karena dipandang selama ini profesionalitas aparat penegak hukum belum memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan. Selain itu, meskipun dipandang sebagai problematika klasik, tetapi sarana dan prasarana pendukungnya, baik yang terkait dengan *hardware* maupun *soft ware* cukup menentukan suatu keberhasilan suatu penegakkan hukum, seperti gedung kantor, penghasilan aparat penegak hukum baik berupa gaji atau tunjangan fungsionalnya, anggaran, alat transportasi, alat perekam, kamera, komputer, internet dan sebagainya.
3. Budaya hukum yang terkait dengan perilaku hukum masyarakat ditandai dengan meningkatnya sikap apatisisme seiring menurunnya tingkat apresiasi masyarakat baik kepada substansi hukum maupun kepada struktur hukum. Peristiwa yang sering terjadi akhir-akhir ini, seperti kasus main hakim sendiri berupa penganiayaan atau pembakaran pelaku kriminal. Bahkan tidak jarang pula perilaku tersebut berujung kepada pelecehan terhadap aparat penegak hukum ketika melaksanakan tugasnya, baik diakibatkan karena turunnya kepercayaan terhadap kinerja aparat penegak hukum, maupun sebagai usaha menghalangi penegakkan hukum itu sendiri, mengingat tersangka/ terdakwa berasal dari kelompok masyarakat tertentu.²⁴

Yang dimaksud Penyidik diatur dalam Pasal 6 ayat 1 KUHP

adalah :

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dengan demikian fungsi penyidik adalah :

- a. Menerima laporan atau pengaduan adanya tindak pidana.
- b. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka.
- c. Mengambil sidik jari dan identitas orang.
- d. Mengeledah badan.

²⁴ Ibid, h. 50

- e. Menangkap orang.
- f. Menahan sementara.
- g. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa.
- h. Mendatangkan ahli.
- i. Menggeledah halaman rumah, gedung, alat pengangkutan darat, laut dan udara.
- j. Melakukan penyitaan barang untuk dijadikan barang bukti dan
- k. Mengambil tindakan-tindakan lain yang perlu dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.²⁵

1.5.6. Penyelidikan

1.5.6.1. Pengertian Penyelidikan

Pasal 1 butir 5 KUHAP mencantumkan : “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dengan perkataan lain, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan.

Perlu digarisbawahi kalimat mencari dan menemukan suatu peristiwa di duga sebagai tindak pidana. Sasaran “mencari dan menemukan” tersebut adalah “suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”.

Dengan perkataan lain “mencari dan menemukan” berarti penyidik berupaya atas inisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Akan tetapi, dalam kenyataan sehari-hari, biasanya penyidik/penyidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan/pengaduan dari pihak yang dirugikan.²⁶

²⁵ M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar, Politeia, Cetakan I, Bogor, 1997, h. 16

²⁶ Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), Sinar Grafika, Cetakan II, Jakarta, 2009, h. 6

1.5.6.2. Pengertian Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Pada pasal 1 butir 2 KUHAP tercantum : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” Berdasarkan rumusan di atas, tugas utama penyidik adalah :

1. Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi.
2. Menemukan tersangka. Apabila proses penyidikan dalam hal ini hanya berkiblat kepada ketentuan yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, maka kecenderungan dalam penyidikan itu hanya dituntut untuk memenuhi permintaan Pasal 184 KUHAP saja yang berupa cukup dengan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.²⁷

1.5.6.3. Aparat Penyidik

Berdasarkan KUHAP pada Pasal 6 ayat 1 tercantum penyidik” adalah :

- a. Pejabat polisi negara Republik
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Pejabat pegawai tertentu yang sekurang-kurangnya

²⁷Hartono, Penyidikan dan Penegakkan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Cetakan I, Jakarta, 2009, h. 49

berpangkat Pengatur Muda tingkat I (Golongan II/b) atas usul Departemen yang bersangkutan, diangkat Menteri Kehakiman setelah mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara RI.²⁸

1.5.6.4. Pegawai Bea dan Cukai

Dalam rangka terciptanya Pegawai Negeri yang setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kepada Negara dan Pemerintah serta bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bersih bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, ditetapkan Undang-Undang tentang pokok-pokok pegawaian (UU No.8 tahun 1974) yang berlaku mulai tanggal 6 November 1974, dan mengatur antara lain tentang kedudukan, kewajiban, hak dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai.

1. Kedudukan

Pegawai Bea dan Cukai, sebagai Pegawai Negeri adalah Unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat, yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kepada Negara dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

²⁸Leden Mapaung. op.cit., h. 73

2. Kewajiban

Pegawai Bea dan Cukai sebagai Pegawai Negeri Wajib Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.

3. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

4. Menyimpan rahasia jabatan.

5. Hak

Pegawai Bea dan Cukai sebagai Pegawai Negeri berhak :

- a. Memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- b. Atas cuti, memperoleh jabatan, tunjangan atau uang duka, apabila mengalami kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.
- c. Atas pensiun, bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

6. Pembinaan

Sebagai Pegawai Negeri, pembinaan Pegawai Bea dan Cukai diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pembinaan Meliputi :

- a. Pembinaan dilaksanakan berdasarkan sistem karier dan prestasi kerja
- b. Kebijakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya berada ditangan Presiden.
- c. Penetapan formasi pegawai dan pengadaan pegawai.
- d. Pengangkatan dalam lingkungan pengangkatan.
- e. Kenaikan pangkat berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan.
- f. Pengangkatan dalam jabatan dengan pengkaitan erat antara kepangkatan dan jabatan.
- g. Sumpah kode etik dan peraturan disiplin.
- h. Penghargaan bagi yang telah menunjukkan kesetiaan atau berjasa kepada Negara atau yang telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa.
- i. Pendidikan dan latihan, yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan dan keterampilan.
- j. Pemberhentian, meliputi pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat.²⁹

1.6. METODOLOGI PENELITIAN

1.6.1. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris istilah lain yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Mengapa demikian? Jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer. Data primer/data dasar adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuisioner.³⁰

1.6.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang bersumber dari perundang-undangan atau dari bahan hukum, baik

²⁹Mari'e Muhammad, *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai Dari Masa ke Masa*, Yayasan Bina Ceria, Cetakan II, Jakarta, 2009, h. 114

³⁰Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Cetakan I, Jakarta, 2008, h. 15

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan dengan alat pengumpul data berupa studi dokumen.

a. Data Sekunder :

Bahan hukum primer merupakan bahan yang berupa peraturan perundang-undangan, dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c. Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai

Bahan hukum sekunder, antara lain berupa tulisan-tulisan dari para pakar dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer meliputi literatur-literatur yang berupa buku, jurnal, makalah dan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Moeljatno Istilah Perbuatan Pidana
2. C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-pokok Hukum Cukai dan Materai
3. Hari Sasangka, Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek Untuk Praktisi, Dosen dan Mahasiswa

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel pada surat kabar atau koran dan majalah.

1.6.3. Pengumpulan Data

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan bahan primer dan bahan sekunder. bahan primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. ini berlainan dengan data sekunder, yakni data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi.³¹ Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif. Sedang bagi penelitian hukum empiris (sosiologis), studi kepustakaan merupakan metode metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuisioner.³²

b. Wawancara

Selama ini metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer dilapangan.³³

Guna memperoleh data primer, dilakukan pengumpulan data secara langsung terhadap obyek penelitian yaitu dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan suatu tanya jawab secara langsung dilakukan secara sistematis tentang masalah Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan

³¹ Rianto Adi, Metodologi Penelitian Social dan Hukum, granit, Jakarta, Cetakan I, 2010, h.57.

³² Bambang Waluyo, Op.Cit. h. 50

³³ Bambang Waluyo, Op.Cit. h. 57

Cukai Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai Hasil Tembakau. Dalam hal ini adalah Inspektorat Bea dan Cukai.

c. Kuisisioner (daftar pertanyaan)

Pengumpulan data melalui metode kuisisioner, dapat dilakukan oleh peneliti dengan cara kuisisioner dikirim langsung kepada responden melalui pos, dengan harapan setelah diisi/dijawab dikirim kembali peneliti. Kuisisioner dapat diserahkan kepada responden dengan cara mendatangi masing-masing responden agar mengisinya.³⁴

1.6.4. Teknik Analisis Data

Proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema – tema dan merumuskan hipotesa – hipotesa. Meskipun tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa. Pada analisis data, tema dan hipotesa dapat lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber – sumber yang ada³⁵.

Penulis dalam melakukan analisa data menggunakan metode analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif dalam bentuk kata – kata atau gambar. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan pengamatan lapangan, potret, tape video, dokumen perorangan, memorandum dan dokumen resmi. Sehingga dapat dilakukan

³⁴ Bambang Waluyo, Op.Cit. h. 54

³⁵ Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Cetakan, VI, Jakarta, 2010, h. 66

untuk responden yang jumlahnya sedikit. Karena itu analisis kualitatif tidak menggunakan alat bantu statistika. Tujuan analisis data dalam penelitian adalah menyempitkan dan membatasi data dengan harapan menjadi data yang tersusun secara baik.³⁶

Langkah awal penulis yaitu melakukan pengumpulan data baik lapangan maupun studi kepustakaan. Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah data, yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut :

a. Editing (memperbaiki)

Membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban-jawaban responden sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban yang satu dengan lainnya serta lain-lain kegiatan dalam rangka lengkap dan sempurnanya jawaban responden, ke semuanya ini merupakan kegiatan editing.

b. Coding

Coding adalah pemberian kode atau tanda tertentu pada jawaban-jawaban responden setelah diedit lazim disebut coding. Kode-kode yang diberikan pada kategori jawaban berbentuk angka arab (1, 2, 3 dan seterusnya) sesuai macamnya. Pemberian kode dilakukan manakala kerja editing telah selesai dilakukan. Tujuan pemberian kode-kode tiada lain adalah untuk memudahkan pekerjaan analisis data yang akan dilakukan.

³⁶ Rianto Adi, Op.cit., h.128.

c. Tabulasi

Tabulasi adalah pekerjaan yang berhubungan dengan penyusunan data yang telah terkumpul ke dalam bentuk tabel.³⁷

1.6.5. Sistematika Penulisan

Pemaparan dari sistematika penulisan ini bertujuan supaya di dalam proses penyampaian materi dari proposal skripsi ini dapat mudah dipahami. Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab. Ada tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :

Bab I merupakan pendahuluan, yang berisi uraian dari isi tulisan ini yang bertujuan memberikan gambaran kepada pembaca mengenai topik yang akan dibahas dalam skripsi ini. Bab I terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

Bab II menjawab rumusan masalah pertama mengenai fungsi penyidik pegawai negeri sipil bea dan cukai dalam proses penyidikan tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau. Dalam bab ketiga ini terdiri atas dua sub bab yakni pertama gambaran tentang fungsi penyidik pegawai negeri sipil bea dan cukai dalam proses penyidikan tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau. Sub bab kedua tentang analisa mengenai fungsi penyidik pegawai negeri sipil bea dan cukai dalam proses penyidikan tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau.

Bab III menjawab rumusan masalah kedua mengenai Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau.

³⁷ Bambang Waluyo, loc.cit. h. 72

Dalam Bab dua ini terdiri atas tiga sub bab yaitu pertama mengenai gambaran singkat terhadap contoh kasus tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau. Kedua mengenai putusan pidana pelaku tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau berdasarkan putusan hakim di Pengadilan Negeri Surabaya, Yang ketiga mengenai Analisa kasus penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau.

Bab IV merupakan bab penutup, yang terdiri atas kesimpulan dan saran terhadap pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan proposal ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian dikemukakan beberapa saran yang relevan dengan permasalahan yang ada, yang sekiranya dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.